

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, R (2022). *Hukum Pidana: Edisi 2*. Media Sains Indonesia.
- Atmasasmita, R. (2020). *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Dewata, M. F. N., & Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, E. (2021). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana. Tanjungpinang–Kepulauan Riau*, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Fadjar, M. (2021). *Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press.
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Jamilah, F. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Margono. (2021). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2015). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, R. (2021). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Prodjodikoro, W. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.
- Soekanto, S. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2023). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta, Rajawali Press.
- Saputra, E. (2021). *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali Press.

- Sinaga, D. (2023). *Metodologi Penelitian* . Jakarta: Uki Press.
- Sugiyono, S. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* . CV. Dotplus Publisher
- Wahyuni, F. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* . Yogyakarta: Publika Global Media.
- Widijowati, Rr. Dijan. (2023). *Perbandingan Hukum Pidana*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Zaidan, A. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zuchdi, D. (2023). *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Ahadi, L. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 113-114.
- Al Arif. (2019). *Penegakan Hukum dalam Prespektif Hukum Progresif*. Undang: Jurnal Hukum, 2(1).
- Alfian, E. (2020). *Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum*. Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.
- Budiman, I. (2021). *Analisis Potensi Perekonomian Pedagang Kaki-Lima di Kota Langsa*. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, 12(2).
- Devy Irmawanti, N., & Arief, B. N. (2021). *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2).
- Dwiyanti, I. A. S. I., Budiarta, I. N. P., & Widyantra, I. M. M. (2021). *Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan*

- Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*). Jurnal Analogi Hukum, 3(2), 251-255.
- Faisal, & Muhammad Rustamaji. (2021). Pembaruan Pilar Hukum Pidana dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), 300.
- Fitri, S. M. (2020). Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 16-27.
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 240.
- Hajairin. (2019). Peradilan Pidana Perspektif Abolisionisme: Kritik Terhadap Model Pemidanaan Fisik Menuju Pemidanaan Psikis. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 3(2), 222.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). *Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 144-159.
- Jazuli, A. (2017). Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 279.
- Kusuma, S. Y. P., & Wilasittha, A. A. (2021). Perkembangan Fraud Theory Dan Relevansi Dalam Realita. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper*, 1(2), 726-735.
- Lobo, F. N., et al. (2023). *Penyediaan Fasilitas Umum Terhadap Penyandang Disabilitas*. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 8(7).
- Mahrus, A. (2008). *Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(2).
- Maleha, N. Y., Saluza, I., & Setiawan, B. (2021). *Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil di Desa Sugih Waras Kec. Teluk Gelam Kab. OKI*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3).
- Marsono, B. U., & Wijaya. (2020). *Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Gugatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jurnal Juristic, 1(01).
- Ngau Lobo, F., et al. (2023). *Penyediaan Fasilitas Umum Terhadap Penyandang Disabilitas*. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 8(7).
- Nurhadi. (2021). *Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 1(1), 52-71.

- Pratana, D., & Robekha, J. (2022). Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui Restorative Justice. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(1), 89.
- Radbruch, G. (2006). *Five Minutes of Legal Philosophy (1945)*. Oxford Journal of Legal Studies, 26(1).
- Ruusen, A. S. (2021). *Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*. Lex Crimen, 10(2).
- Saraswati, P. S. (2015). Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 152.
- Sinaga, E. M. C. (2019). Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 2.
- Suherman, A. (2020). Esensi asas legalitas dalam penegakan hukum pidana lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 133-152.
- Sumardijanto, S., Sucitra, I. B., & Subanidja, S. (2023). *Strategi Preventif Pencegahan Peredaran Uang Palsu Di Indonesia*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 9744-9755.
- Sundari, N., Luthfiyah, F. Z., & Rahmawati, W. (2024). Peran hukum sebagai alat rekayasa masyarakat menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 7.
- Supriyadi, M. W., et al. (2025). *Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum*. Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, 7(1).
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 72).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 74).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomo 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 seri D).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2).

Indonesia. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014. (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 2).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 7/E).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Surabaya. (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 9).

Internet

Antara Media, Sejumlah Pedagang Mengeluhkan Harga Sewa Stan Di KBS Mahal, dikutip pada 10 Mei 2025 pada <https://www.antaranews.com/berita/3532917/sejumlah-pedagang-mengeluhkan-harga-sewa-stan-di-kbs-mahal>

Denpasar Kita. Berjualan *di atas trotoar*, PKL ditipiring Rp. 300.000. Diakses pada 25 April dari <https://www.denpasarkota.go.id/berita/berjualan-di-atas-trotoar-pkl-ditipiring-rp-300000>

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. *Satpol PP Kota Surabaya sosialisasikan Perda trotoar, bukan tempat PKL dan parkir*. Diakses pada 21 Maret 2025 dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/satpol-pp-surabaya-sosialisasikan-perda-trotoar-bukan-tempat-pkl-dan-parkir>

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, diakses pada 26 Februari 2025 di <https://kbbi.web.id/delik>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, diakses pada 26 Februari 2025 di <https://kbbi.web.id/langgar>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, diakses pada 26 Februari 2025, di <https://kbbi.web.id/pamong>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, diakses pada tanggal 24 februari 2025, <https://kbbi.web.id/fasilitas>.

Radar Surabaya, Pemkot Surabaya Menerima Lebih Dari 3,5 Hektare Fasum Dari Pengembang, diakses pada 27 Februari 2025, di <https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/775273694/pemkot-surabaya-terima-35-hektare-lebih-fasum-jalan-dan-saluran-dari-pengembang-begini-rinciannya>.

Wawancara

Agustinus Anang Timur Prakoso, S.H., diwawancarai oleh Rizky Ardian Pratama, 27 Februari 2025, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Indonesia.

Agustinus Anang Timur Prakoso, S.H., diwawancarai oleh Rizky Ardian Pratama, 14 Maret 2025, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Indonesia.

Febri diwawancarai oleh Rizky Ardian Pratama, 25 Mei 2025, Trotoar Jalan Pendegiling, Kota Surabaya, Indonesia.

Kosim diwawancarai oleh Rizky Ardian Pratama, 25 Mei 2025, Trotoar Jalan Pendegiling, Kota Surabaya, Indonesia.

Yuli diwawancarai oleh Rizky Ardian Pratama, 25 Mei 2025, Trotoar Jalan Pakal, Kota Surabaya, Indonesia.

Cipto diwawancarai oleh Rizky Ardian Pratama, 25 Mei 2025, Trotoar Jalan Simo Gunung, Kota Surabaya, Indonesia